

PERAN DAN KIPRAH AKTIVIS DAN PEMIMPIN PEREMPUAN ACEH SELATAN PADA KONFLIK DAN PASCA KONFLIK ACEH

Analiansyah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email : nashriayah@gmail.com

Abstract

The long conflict in Aceh, have men and women discouraged to take part in society. Nevertheless, there are still figures of women who want and dare to do community organizing until the era of Aceh Peace. This article explains what and how the role of some women figures in South Aceh, both as activists and women leaders. This ethnographic research and women's role show that women contribute greatly to development, even in difficult situations such as conflict. The roles are initiating and strengthening women's organizations, enhancing human resource capacity, empowering the economy, initiating organizations specifically dealing with women and children who are vulnerable to violence, facilitating and supporting women in the political sphere. The involvement of women figures is based on several factors: 1) Their concerns about the socio-political conditions of Aceh, 2) Disillusionment with the gender bias in society that makes the space for women in the public very limited.

Keyword: *activists; leaders; womens; socio-political; Aceh*

Pendahuluan

Tulisan ini menjelaskan peran¹ dan kiprah² aktivis³ dan pemimpin perempuan⁴ di Aceh Selatan⁵ pada masa konflik sampai pasca konflik dalam

¹Menurut KBBI Online, di antara pengertian peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat

²Menurut KBBI Online, di antara pengertian kiprah adalah derap kegiatan.

³Menurut KBBI Online, aktivis adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya; atau seseorang yang menggerakkan (demonstrasi dan sebagainya). Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan aktivis adalah orang perempuan yang tergabung dalam anggota organisasi politik dan sosial di Aceh Selatan yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya.

⁴Menurut KBBI Online, pengertian memimpin, di antaranya, adalah mengetuai atau mengepalai (rapat, perkumpulan, dan sebagainya). Adapun yang dimaksud dengan pemimpin

membangun dan mengembangkan Sumberdaya Daya Manusia (SDM), serta perekonomian masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Aktivistis dan pemimpin perempuan dalam tulisan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dipisahkan. Mereka adalah perempuan yang bekerja aktif mendorong terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat, baik sebagai anggota organisasi, partai politik, pemimpin di komunitas, maupun penggerak perekonomian masyarakat. Penjelasan tersebut adalah berupa latar belakang yang menginspirasi dan bentuk-bentuk peran yang mereka lakukan. Sehingga, kiprah dan peran mereka dapat dikenali dan terdeskripsikan secara sistematis.

Di Aceh Selatan, ditemukan aktivis dan pemimpin perempuan yang memainkan peran strategis dalam membangun dan membina sumberdaya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat. Di antara peran tersebut adalah menggerakkan organisasi kelompok perempuan dan membangun perekonomian kelompok perempuan. Peran tersebut memberikan dampak yang besar sehingga diterima luas, bukan saja oleh keluarga mereka namun juga oleh masyarakat luas. Lebih jauh lagi adalah dalam keadaan dan pada masa tertentu masyarakat mempercayakan perempuan untuk berada di garis depan, baik di lembaga legislatif maupun dalam unsur pemerintahan di tingkat terkecil, seperti desa dan dusun. Mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Gambaran ini sekaligus membantah pemikiran yang menganggap kehadiran perempuan di ruang publik tidak memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Penelitian ini menunjukkan argumentasi tersebut.

Keadaan di atas berbeda dengan konsep yang dianut dalam masyarakat agamis tradisional meski menganut sistem kekerabatan patrilineal dan bilateral.⁶ Bagi mereka, ruang publik relatif dikuasai oleh laki-laki, sementara perempuan lebih dominan berada di ruang privat. Hal ini terjadi juga di Aceh Selatan,

perempuan dalam tulisan ini adalah perempuan yang mengetuai suatu komunitas dan perkumpulan di kantor atau masyarakatnya.

⁵Aceh Selatan adalah nama kabupaten di Provinsi Aceh.

⁶Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ayah. Adapun bilateral adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ayah dan ibu. Lihat misalnya Essi Hermaliza, "Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan", *Widyariset*, Vol. 14, No. 1, 2011, hlm. 124.

dimana ruang publik lebih didominasi oleh laki-laki. Masyarakat Aceh Selatan, sebagaimana umumnya di Aceh adalah masyarakat agamis yang menganut sistem kekerabatan bilateral,⁷ kecuali di sebagian wilayah Aceh, seperti Gayo menganut sistem kekerabatan patrilineal.⁸ Jadi, walaupun menganut dua sistem tersebut, namun kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki. Artinya, dalam kaitan dengan pembagian ruang, ruang publik tetap dikuasai oleh laki-laki.⁹

Umumnya di Aceh perempuan lebih dominan berkiprah di ruang domestik. Banyak anggota masyarakat tidak siap dengan terbukanya ruang publik bagi perempuan. Bahkan terdapat pihak yang beranggapan bahwa kerusakan moral masyarakat turut diakibatkan oleh keterlibatan perempuan di ruang publik. Kehadiran perempuan di ruang publik dianggap tidak memberi dampak positif terhadap pembangunan. Sehingga, terdapat kalangan yang menolak peran aktif perempuan di ruang publik; dalam hasil penelitian hal ini akan terungkap, bagaimana misalnya anak perempuan tidak diizinkan sekolah tinggi karena harus merantau ke tempat lain.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ternyata di Aceh Selatan, terdapat perempuan yang menjadi aktivis dan pemimpin di masyarakatnya. Dari perspektif gender, penelitian terhadap peran dan kiprah perempuan perlu diungkap dan dideskripsikan. Sehingga apa saja bentuk kontribusi mereka di ranah publik dalam banyak hal dapat diungkap. Pengungkapan ini sekaligus mengindikasikan bahwa perempuan di Aceh Selatan turut berperan aktif di ranah publik dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah. Diharapkan melalui penjelasan peran yang telah mereka lakukan tidak dilupakan dan bahkan dapat menjadi inspirasi untuk turut melibatkan

⁷Adnan Abdullah, dkk., *Kedudukan dan Peranan Wanita Pedesaan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986), hlm. 30; Essi Hermaliza, "Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan", hlm. 131.

⁸Lihat misalnya Rida Safuan Selian, "Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan "Ngerje" Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah", *Tesis*, (Semarang: Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2007), hlm. 146.

⁹Ni Nyoman Sukerti, "Gender Dalam Hukum Adat," *Makalah Ilmiah*, hlm. 5; Bandingkan dengan Khoiruddin Nasution, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVII, tahun 2007, hlm. 94.

perempuan di ranah publik. Karena, berangkat dari pengalaman perempuan ini terdapat banyak hal yang tidak terpikirkan atau dilakukan oleh laki-laki saja, atau banyak inspirasi yang datang dari perempuan karena kepekaan dan sensitivitas terhadap situasi yang ada.

Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia telah terjadi sejak tahun 1976, yaitu dengan diproklamirkannya Gerakan Aceh Merdeka,¹⁰ sampai 2005 (ditandatanganinya perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dikenal dengan sebutan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005),¹¹ dan pasca konflik sejak 2005 sampai 2004, saat penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa sajakah bentuk peran dan kiprah aktivis dan pemimpin perempuan di Aceh Selatan pada masa konflik sampai masa damai di Aceh? (2) Apakah yang melatar belakangi peran dan kiprah tersebut? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menjelaskan bentuk peran dan kiprah aktivis dan pemimpin perempuan di Aceh Selatan pada masa dan pasca konflik di Aceh, dan latar belakang peran dan kiprah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah etnografi dari perspektif gender, sumber data yang digunakan adalah sumber primer yang terdiri dua kategori, yaitu aktivis perempuan dan pemimpin perempuan. Aktivis perempuan yang dimaksud di sini adalah perempuan yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan sosial politik dan terlibat dalam berbagai kegiatan mengorganisir masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Tujuan aktivitas tersebut adalah untuk kepentingan umum dan memberikan dampak dalam pembangunan. Adapun pemimpin perempuan yang dimaksud di sini adalah perempuan yang menjadi pemimpin di masyarakatnya dan juga terlibat dalam berbagai kegiatan untuk

¹⁰Kurnia Jayati, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Tahun 1976-2005", *Jurnal Al-Turas*, Vol XIX No. 1, Januari 2013, hlm. 49-50.

¹¹Muhammad Iqbal, "Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki", *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun VII, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 160.

membangun sumber daya manusia dan membangun perekonomian masyarakat, khususnya perempuan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar latar belakang masa lalu yang menginspirasi mereka menjadi aktivis dan pemimpin dan bentuk-bentuk kegiatan yang mereka lakukan sampai wawancara dilakukan. Selanjutnya analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan perspektif gender.

Pembahasan

1. Latar Belakang Kehidupan Narasumber

Setiap orang memiliki sejarah dan dinamika kehidupan yang berbeda-beda. Sejarah hidup tersebut tentu saja turut menentukan langkah-langkah yang diambil selanjutnya. Bagian ini perlu diungkap untuk mengetahui sejarah masa kecil sampai dewasa yang membuat narasumber menjadi figur yang bertekad untuk menginisiasi, mendorong, dan mengembangkan kelompok perempuan dari berbagai aspek. Berikut ini dijelaskan masa lalu narasumber yang berujung pada tekad memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pembangunan.

Seorang narasumber menceritakan bahwa dia adalah putri Aceh Selatan yang memiliki inteligensia yang tinggi dan bakat untuk menempuh pendidikan yang baik, namun karena tradisi di dalam keluarga tidak mendukung, potensi tersebut tidak berkembang secara optimal. Ayahnya tidak mengizinkannya untuk melanjutkan studi karena dia adalah seorang perempuan. Narasumber menuturkan:

Saya ini sebenarnya korban... Karena ketika tamat PGA (Pendidikan Guru Agama-pen) ada tawaran melanjutkan ke Banda Aceh. Waktu itu diumumkan siapa yang lulus tes akan dapat beasiswa dan saya lulus peringkat 1. Tapi ayah saya tidak mengizinkan saya sekolah ke Banda Aceh. Di situ saya kecewa. Tapi dalam hati saya, saya harus tetap belajar agar bisa maju. Saya akan melanjutkan nanti. Saya nggak patah semangat.

Saya terus belajar. Saya terus belajar dan juga mengajar. Tugas saya belajar-mengajar di SRI, namanya kami dulu. Saya belajar dan mengajar.¹²

Pernyataan narasumber di atas telah mengindikasikan betapa perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Banyak orang tua berharap lebih besar kepada anak laki-lakinya untuk menempuh pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, meski anak perempuannya lebih cerdas. Inilah salah satu bentuk diskriminasi gender yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Narasumber adalah alumni PGA yang memungkinkannya mengajar, karena PGA adalah sekolah menengah atas yang dipersiapkan untuk calon guru agama. Berbekal pendidikan ini, dia mengajar di SMI (Sekolah Menengah Islam) di Aceh Selatan. Di tengah kesibukannya mengajar di SMI, narasumber juga banyak menghabiskan waktunya untuk belajar, terutama secara otodidak. Keadaan ini berjalan sampai tahun 1953. Selain itu, dia bergabung dengan organisasi kemasyarakatan Islam, yaitu Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, narasumber bergabung dengan NA (An-Nasiatul Aisyah) dan selanjutnya dengan Aisyah. Ketika bergabung dengan Muhammadiyah, narasumber aktif melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Berbekal pengalaman berorganisasi ini, pada tahun 1971, narasumber dipilih sebagai calon anggota DPRD Tingkat II Aceh Selatan melalui Partai Golkar, meski waktu itu tidak terpilih karena berasal dari organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah diposisikan sebagai kader PPP. Narasumber tidak putus asa dan terpilih sebagai anggota DPRD Tingkat II Aceh Selatan tahun 1977-1983 dan 1983-1988.¹³

Narasumber selanjutnya menuturkan bahwa dia berasal dari keluarga politisi dan pejabat di Aceh Selatan. Ayahnya adalah seorang politis dari Partai Golkar pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Narasumber mengamati secara kritis perpolitikan yang ada pada waktu itu, yaitu Golkar adalah partai

¹²Hasil wawancara dengan Rosna Anas, di Aceh Selatan pada tanggal 31 Januari 2014.

¹³Hasil wawancara dengan Rosna Anas, di Aceh Selatan pada tanggal 31 Januari 2014.

pemerintah. Sehingga, partai lainnya, PPP dan PDI, menurutnya, kurang mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah. Narasumber ini mengatakan:

... Iya kalau dengan partai politik, sebenarnya dari kecil saya sudah dengan partai politik. Dari masih SMP sudah aktif sebenarnya, karena waktu itu bapak saya di Golkar, adek mamak saya camat. Jadi, waktu itu kan masih 3 partai, PPP, PDI, Golkar. Itu jaman 80-an atau 70an, ada partai penguasa, artinya lebih cenderung kepada satu partai, pada jaman itu ya, dari kecil saya sudah melihat tidak adanya keadilan. Dengan partai Golkar itu saya selalu bertentangan. Ini pribadi ya. Kenapa? Dari pusat sampai daerah wajib Golkar. Ini mohon maaf. Sementara ada tiga partai. Jadi, saya sering mengatakan kepada bapak dan kepada yang lain, kenapa semua harus ikut (ke Golkar-Pen). Saya justru dianggap sebagai penentang mungkin waktu itu. Saya bilang, mohon maaf, WC aja di bangun atas nama WC Golkar...¹⁴

Narasumber ini menganggap, tidak adanya kebebasan berpendapat yang sesungguhnya pada era Orde Baru. Sehingga masyarakat “dikondisikan” untuk memilih Partai Golkar. Pembangunan yang diberikan di suatu daerah, mulai dari gampong (desa), kecamatan dan seterusnya selalu dianggap bagian dari kemenangan Partai Golkar. Kondisi ini ternyata mengusik rasa kritis narasumber. Sehingga ada keinginan untuk mendobrak keadaan tersebut. Narasumber ini memperjuangkan kebebasan berpolitik dan berpendapat bagi masyarakat. Keinginan tersebut sangatlah kuat sampai dewasa dan bahkan setelah berkeluarga. Narasumber meminta izin kepada suaminya yang memilih partai Golkar untuk berbeda pilihan partai politik pada setiap kali Pemilu. Selain itu, narasumber melihat adanya ketimpangan gender dalam pembangunan. Dia melihat perempuan memiliki potensi dan untuk menggali serta memperkuat potensi tersebut diperlukan suatu lembaga yang khusus bagi perempuan. Inilah cikal bakal yang mengantarkannya menjadi aktivis perempuan di Aceh Selatan dengan membuat organisasi perempuan yang diberi nama LP2S Lembaga Pemberdayaan Putri Selatan.

Narasumber lainnya menuturkan bahwa dia sudah aktif dalam berorganisasi sejak masih Sekolah Keperawatan di Yogyakarta. Dia menempun sekolah keperawatan selama lima tahun dan selama itu pula aktif di organisasi

¹⁴Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

sekolah. Setelah tamat, pulang ke Aceh Selatan dan bergabung dengan Organisasi Perempuan Muhammadiyah, yaitu Aisyiah. Pengalaman berorganisasi selama di Sekolah Keperawatan tidak hanya dimanfaatkan untuk menggerakkan organisasi Aisyiah, namun juga organisasi perempuan lainnya di Aceh Selatan yang difokuskan tidak hanya pada aspek Pendidikan, tetapi juga aspek pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan.¹⁵

2. Bentuk Peran dan Kiprah Perempuan Aceh Selatan

Berikut ini dijelaskan bentuk-bentuk peran dan kiprah yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan di Aceh Selatan sejak masa konflik sampai era damai. Peran dan kiprah ini meliputi berbagai bidang, yaitu pembentukan dan penguatan organisasi atau lembaga, peningkatan kapasitas, dan penguatan ekonomi keluarga melalui kelompok perempuan.

a. Menggagas dan Memperkuat Organisasi untuk Perempuan

Terkait dengan organisasi, perempuan di Aceh Selatan terlibat aktif, baik pembentukannya maupun penguatannya. Organisasi yang dibentuk oleh dan untuk perempuan adalah LP2S (Lembaga Pemberdayaan Putri Selatan) dan KPAB (Komite Perempuan Aceh Bangkit). Adapun penguatan organisasi perempuan adalah Nasyiatul Aisyiah, Aisyiah, GOW (Gabungan Organisasi Wanita), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), dan JKMA (Jaringan Komunitas Masyarakat Adat).

Di bawah ini dijelaskan organisasi yang diciptakan oleh Perempuan Aceh Selatan dan sebagian lagi keterlibatan Perempuan Aceh Selatan dalam menggagasnya. Di antaranya adalah LP2S (Lembaga Pemberdayaan Putri Selatan) dan KPAB (Komite Perempuan Aceh Bangkit).

1) LP2S (Lembaga Pemberdayaan Putri Selatan)

LP2S singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Putri Selatan adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (SDM). LP2S secara resmi dideklarasikan setelah Aceh memasuki fase damai, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2006. LP2S

¹⁵Hasil wawancara dengan Dasmara Sukma, di Tapak Tuan, 31 Januari 2014.

merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus menangani kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) terhadap perempuan dan anak.¹⁶ Di dalam *website* mereka disebutkan bahwa lembaga tersebut berfungsi menampung aspirasi kaum perempuan. Kemudian, LP2S berperan dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di segala bidang baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁷

Sebagai sebuah LSM, LP2S tentu saja memiliki tujuan, visi dan misi. Berikut ini adalah tujuan mereka, yaitu:

- a) Untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan
- b) Untuk meningkatkan taraf perekonomian kaum perempuan
- c) Untuk membela hak-hak kaum perempuan.
- d) Melatih, membina, dan memajukan sumberdaya manusia (SDM) bagi seluruh perempuan Aceh Selatan.

Visinya adalah: untuk menyadarkan seluruh masyarakat Aceh Selatan bahwa kaum perempuan juga dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Agar tercapainya masyarakat yang madani dan demokrasi, berkeadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun Misinya adalah:

- a) Melakukan upaya pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan, baik itu sosial, budaya, dan politik, serta agama.
- b) Melakukan pengkajian dan pendidikan politik bagi kaum perempuan, supaya bisa mencapai peningkatan dan pengembangan peran politik perempuan di segala aspek pembangunan.
- c) Menyadarkan kaum perempuan akan hak dan kewajiban dalam kehidupan serta memberikan advokasi untuk terpenuhinya hak-hak tersebut.

¹⁶Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

¹⁷www.lp2s.weebly.com.

d) Malaksanakan sosialisasi politik dalam perspektif perempuan, untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan Gender.¹⁸

LP2S hanya mengambil Aceh Selatan sebagai wilayah kereja mereka. Perlu digambarkan di sini bahwa ide pembentukan LP2S didasarkan pada kondisi perempuan dan anak yang relatif rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi. Menurut narasumber, kondisi ini telah disaksikannya sejak masa konflik dan berlangsung terus sampai setelah musibah Tsunami melanda Aceh.¹⁹ Aceh dilanda oleh tsunami besar yang juga menimpa beberapa negara di dunia, seperti Sri Lanka, Thailand, dan Maldives. Namun, sebagai pusat gempa, Aceh-Indonesia mengalami kerusakan terbesar dibandingkan dengan negara-negara lainnya.²⁰

Apakah yang menimpa perempuan selama konflik berlangsung? Ternyata selama konflik berlangsung banyak perempuan mengalami penindasan. Menurut narasumber, pada masa konflik banyak suami yang pergi meninggalkan isteri dan anak-anak serta keluarganya yang lain, seperti ibu dan saudara perempuannya. Kondisi seperti ini sangat riskan bagi perempuan Aceh Selatan mengalami gangguan dan perilaku tidak menyenangkan lainnya, bahkan menjurus kepada penyiksaan dan tidak jarang pula yang berujung pada perkosaan. Pelakunya tentu saja dari pihak-pihak yang bertikai. Terdapat kasus perkosaan yang coba mereka tangani, namun tidak berhasil karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.²¹

Untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ini di era konflik, aktivis perempuan mengaku tidak bisa menjalankan program pendampingan terhadap perempuan secara terang-terangan. Karena berdasarkan pengalaman yang ada, banyak perempuan yang melakukan pendampingan secara terang-terangan ditangkap oleh pihak-pihak yang bertikai. Di era konflik, aktivis dianggap satu

¹⁸www.lp2s.weebly.com.

¹⁹Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

²⁰Elvira Iskandar, "Ketersediaan Lahan Pertanian Padi Sawah Pasca Tsunami Di Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Agrisepe*, Vol (14) No. 1, 2013, hlm. 54.

²¹Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

bentuk afiliasi terhadap salah satu pihak yang bertikai. Dengan demikian aktivis yang ingin tetap eksis dan bisa berkiprah harus bergerak secara diam-diam dan menjaga netralitas mereka.²²

Selama konflik berlangsung, bentuk bantuan yang diberikan adalah berupa pendampingan terhadap perempuan yang mengalami tekanan atau berbagai tindak kekerasan. Pada masa konflik, pemberian bantuan ini semata-mata masih didasarkan pada rasa kemanusiaan, karena belum memiliki legalitas sebagai pendamping. Karena memang lembaga LP2S baru diresmikan setelah konflik, yaitu tahun 2006. Aktivis perempuan memberikan pendampingan kepada orang yang melapor secara resmi. Sedangkan bagi yang tidak bersedia melapor, namun aktivis mengetahuinya, maka mereka akan mendatangnya.

Dampingan yang diberikan kepada korban biasanya diberikan dalam bentuk psikis, seperti motivasi dan penguatan mental. Sebagai contoh, narasumber mengatakan: “kalau aparat datang nanti kita jangan terus lari, ... jelaskan apa yang bisa kita bantu, berikan penjelasan. Kalau kita lari, kan mereka menganggap kita ikut GAM. ... (kemudian-pen) mereka melakukan”.²³

Dalam menjalankan aktivitasnya melakukan pendampingan, narasumber juga mengajak masyarakat luas untuk berperan serta. Berbagai teknik dilakukan, seperti bergabung dengan kelompok wirid yasin, selain mengajak ibu-ibu rumah tangga. Hal ini dilakukan karena memang kegiatan mereka tidaklah resmi. Dengan teknik seperti ini, banyak ibu-ibu yang merasakan ketidakadilan bangkit. Dari pendampingan ini, mulai bermunculan kaum perempuan yang berani menghadapi pihak-pihak yang dianggap dapat menzalimi keluarga mereka.

Apa yang didapatkan para aktivis perempuan ini ketika menjalankan aksinya? Ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa, karena kegiatan ini murni berasal dari hati nurani mereka sendiri. Mereka tidak tahan menyaksikan berbagai kezaliman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mereka. Di sisi

²²Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

²³Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

lain, kiprah perempuan sangatlah tinggi. Banyak perempuan berjuang sendiri-sendiri, mereka tidak terorganisir. Tidak ada LSM yang memayungi mereka. Kondisi ini diakibatkan oleh rasa takut yang mendalam yang dirasakan oleh masyarakat luas. Ibu-ibu hanya berani bicara dari mulut ke mulut, namun tidak dalam bentuk yang terkoordinir secara rapi. Di sinilah memang nilai penting dari gerakan aktivis perempuan ini. Inilah awal mula dan cikal bakal inspirasi pendirian LP2S.

Terdapat beberapa peristiwa lain yang menjadi pemicu pendirian LSM ini, yaitu:

- a) Terlibat dalam SIRA. Pada tahun 1999 aktivis perempuan Aceh Selatan turut serta mengikuti kegiatan SIRA yang dilaksanakan di Banda Aceh. Beberapa aktivis perempuan Aceh Selatan turut serta mengerahkan massa untuk menghadiri acara tersebut. Keikutsertaan ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan damai yang dilaksanakan SIRA. Beberapa aktivis perempuan ini meninggalkan keluarga untuk berangkat ke Banda Aceh mendukung terlaksananya referendum. Pengerahan massa yang mendukung referendum memiliki jaringan tersendiri, yaitu di kalangan masyarakat saling mengajak dan saling memberi motivasi, termasuk dari kalangan pemimpin perempuan yang selama ini mendukung upaya perdamaian melalui non kekerasan.
- b) *Duek Pakat Inong Aceh* (DPIA). Aktivis perempuan Aceh Selatan juga terlibat dalam *Duek Pakat Inong Aceh*. *Duek Pakat* pada awalnya terbentuk untuk menanggapi isu-isu seputar kondisi perempuan semasa konflik di Aceh. Banyak dari perempuan Aceh menjadi korban kekerasan konflik, namun pada saat itu, kelompok-kelompok perempuan kurang mendapatkan perhatian dalam proses-proses

penyelesaian konflik. *Duek Pakat* merupakan cikal bakal lahirnya Balaisyura Ureung Inong Aceh yang masih eksis hingga saat ini.²⁴

- c) Menggalang bantuan untuk korban Tsunami. Tsunami menerjang Aceh manakala konflik masih berkecamuk. Akibatnya Pemerintah Daerah Aceh Selatan lambat mengambil tindakan. Menyikapi kondisi ini, para aktivis perempuan secara serta merta menggalang bantuan untuk korban Tsunami.

Tsunami itu belum ada satu lembaga perempuan pun di Aceh Selatan, waktu tu kak Tini (panggilan narasumber-pen) jualan. Lagi Tsunaminya itu kita melihat lagi di metro TV. Panggilan hati ini. Nggak tau kita harus ngomong apa. Jadi dengan berpikir spontan kita pedagang, jualan banyak baju layak pakek yang tidak laku, di sualayan Tapak Tuan itu kak ... kumpul bikin posko.²⁵

Aktivis perempuan yang membuat posko bantuan untuk korban Tsunami awalnya menerima tanggapan miring dari aparat keamanan karena dianggap illegal. Para aktivis ini mengumpulkan bantuan dari para pedagang dari masyarakat luas. Bantuan dapat berupa pakaian, nasi bungkus, makanan siap saji, dan lain sebagainya. Mereka membuat jaringan secara cepat dengan berkoordinasi dengan kepala desa yang ada di Tapak Tuan.

Menghadapi ancaman penangkapan dari aparat keamanan dan barang bantuan harus disita, para aktivis bersikeras harus menyampaikan bantuan untuk korban tsunami, walaupun setelah itu mereka ditangkap dan dipenjarakan. Aparat kepolisian yang menghadapi sikap keras ini kemudian mengerti betapa pentingnya misi kemanusiaan yang digalang oleh para aktivis perempuan. Barang bantuan Tsunami kemudian didistribusikan oleh aktivis bersama polisi BKO ke daerah Meulaboh (pusat gempa di Aceh) menggunakan mobil Polri. Aksi simpatik dan brilliant ini akhirnya mendapat sambutan yang

²⁴Lihat misalnya Marwan Idris, "Kesukarelawanan dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Aceh," *Laporan Penelitian*, Aceh, Indonesia, 2011, hlm. 21.

²⁵Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

baik dari aparat kepolisian dan Pemda Aceh Selatan, dan dilanjutkan dengan pendirian posko bantuan Pemda.

Kegiatan aktivis perempuan untuk menyuarkan keadilan dan pembebasan dari berbagai tindakan zalim bukanlah tanpa tantangan dan resiko. Banyak aktivis yang ditangkap. Para aktivis perempuan ini sangat menyadari hal itu. Namun karena telah menjadi panggilan hati mereka tetap menjalankan aktivitasnya. Pemerintah menganggap aktivis sebagai bentuk keberpihakan kepada GAM, dan kadang kala oleh GAM dianggap pro pemerintah RI. Jadi mereka berada pada posisi yang riskan. Inilah sebabnya, mereka harus benar-benar menjaga netralitas dan meyakinkan pihak-pihak yang bertikai bahwa mereka hanyalah menjalankan misi kemanusiaan tanpa menjadi bagian dari salah satu kelompok.

Kalau kita lebih kepada mengisukan ketidakadilan kekerasan yang dialami oleh masyarakat tadi maaf pemerintah menganggap kita itu ikut bagian dari pejuang. Jadi kita memang menyuarkan itu tadi nggak bisa transparan, nggak bisa terang-terangan. Jadi kita memberikan motivasi kepada mereka selamat kan diri bagaimana cara, silahkan anda berdua muka yang penting anda selamat dan tidak mengkhianati. Aktivitas dianggap bagian dari GAM oleh GAM dianggap bagian dari polisi. Itu tantangannya pada masa konflik.²⁶

2) KPAB (Komite Perempuan Aceh Bangkit)

Selain LP2S, kelompok perempuan Aceh Selatan juga mendirikan KPAB (Komite Perempuan Aceh Bangkit). Komite ini dibentuk di berbagai daerah di Aceh dan berpusat di Provinsi Aceh. KPAB didirikan setelah LINA (Liga Inong Aceh) lahir. Beberapa aktivis perempuan Aceh Selatan turut terlibat dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh LINA, meski bukan sebagai anggota. Sebagian aktivis perempuan bergabung dengan Balai Sura Ureung Inong Aceh.

Aktivitas KPAB adalah memotivasi perempuan Aceh Selatan untuk bersatu, harus berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Menurut Narasumber ini, perempuan se-Aceh Selatan harus bersatu. Jadi visinya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Mereka mengampanyekan

²⁶Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

bahwa harkat dan martabat kaum perempuan harus diperjuangkan. Untuk merealisasikan visinya, KPAB sempat melahirkan sebuah Partai Lokal, yaitu PARA (Partai Aliansi Rakyat Aceh) Peduli Perempuan. Namun sayangnya partai baru tersebut tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh KIP (Komisi Independen Pemilihan). Pengakuan dari narasumber bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti mengapa partai lokal tersebut tidak lolos verifikasi. Mereka memprediksi ketidak lolosan tersebut karena partai perempuan. Memang, jelas nuansanya adalah untuk “perempuan” dan mayoritas pengurusnya juga perempuan.²⁷

Program utama partai PARA Peduli Perempuan adalah bagaimana caranya agar banyak perempuan bisa menjadi Caleg (Calon Legislatif), baik di DPR, DPRA, maupun DPRK pada PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 2009. Namun, sayang ia tidak lolos verifikasi. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan tidak bisa berbuat banyak dan perempuan Aceh Selatan “kocar kacir” mencari partai lain.

b. Memperkuat Organisasi untuk Perempuan

Selain pembentukan organisasi untuk perempuan, perempuan di Aceh Selatan juga aktif dalam melakukan pembinaan dan memperkuat organisasi untuk perempuan. Organisasi perempuan yang dibina terdiri dari Nasyiatul Aisyiah (organisasi bagi remaja putri di Muhammadiyah), Aisyiah (organisasi bagi ibu-ibu di Muhammadiyah), GOW (Gabungan Organisasi Wanita), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), dan JKMA.

Dewasa ini, seorang narasumber masih terlibat di berbagai organisasi, namun karena sudah lanjut usia (berumur 78 tahun) memilih sebagai penasehat pada beberapa organisasi kewanitaan di Aceh Selatan, kecuali PKK dan Aisyiah yang masih aktif. Organisasi yang berada di bawah binaanya adalah: GOW (Gabungan Organisasi Wanita), TKI, dan BKMT. Sedangkan jabatan jajaran ketua yang dia pegang adalah PKK dan Aisyiah.²⁸

²⁷Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

²⁸Hasil wawancara dengan Rosna Anas, di Tapak Tuan, pada tanggal 31 Januari 2014.

Organisasi yang tergabung ke dalam GOW adalah Darmawanita, Bayangkari, Persit KCK (Kartika Chandra Kirana) yang di Kodim, IBI (Ikatan Bidan Indonesia) kalau kami dulu ada namanya HWK (Himpunan Wanita Karya), Nasyiatul Aisyiyah (organisasi remaja putrid Muhammadiyah), dan Aisyiah (organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah), PKK, BKMT.

Waktu saya, sesuai dengan tujuan GOW tadi. Tujuan GOW adalah mengangkat harkat dan martabat wanita. Satu tujuan yang pertama sekali adalah mempersatukan kaum wanita. Darma kaum wanita itu tidak ada ketentuan, dan yang ketiga menjadikan ilmu kepada kaum wanita itu pak. Ilmu yang kita berikan kepada kaum wanita jangan sampai kaum wanita itu semberono nggak ada ketentuan, makanya saya tiap tiap organisasi tadi saya tetap membicarakan ini.²⁹

Narasumber telah terlibat dalam organisasi kewanitaan sejak tahun 1953 dan tidak pernah berhenti sampai sekarang (2014) ketika penelitian ini dilaksanakan. Selain aktif dalam mengembangkan organisasi, juga aktif dalam pengembangan masyarakat, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam sosial politik.

Di antara yang menarik dicermati di sini adalah pelibatan perempuan dalam berbagai organisasi. Organisasi merupakan satu wadah yang dapat melatih anggotanya, termasuk perempuan, untuk bisa terlibat dalam urusan publik dengan baik. Inilah salah satu bentuk *capacity building* yang dilakukan narasumber di Aceh Selatan. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian narasumber menjadi salah satu referensi bagi kelompok perempuan di Aceh Selatan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa perempuan mampu dan berperan penting dalam membangun masyarakatnya. Perempuan mampu dan berperan penting dalam meningkatkan SDM sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan agama. Narasumber ini turut berkontribusi signifikan dalam menciptakan rasa percaya diri di kalangan politisi perempuan, dengan menunjukkan bagaimana peran yang dimainkannya di gedung DPRK Aceh Selatan ketika menjadi terpilih

²⁹Hasil wawancara dengan Rosna Anas, di Tapak Tuan, pada tanggal 31 Januari 2014.

menjadi anggota legislatif sebanyak dua periode. Dewasa ini pembinaan terhadap Caleg (Calon Legislatif) perempuan juga dilakukan dengan memberi tip bagi Caleg perempuan. Di antara tip tersebut adalah dengan mencari massa ke mana saja pergi, seperti melalui organisasi wanita atau ke GOW, mencari massa ke kampung-kampung, dan membuat persatuan untuk perempuan. Perempuan harus mengangkat aspirasi perempuan, termasuk di antaranya melalui pemberdayaan ekonomi kaum perempuan.³⁰

Selain uraian di atas, usaha perempuan Aceh Selatan untuk memperkuat organisasi untuk perempuan juga dilakukan melalui memasukkan unsur perempuan dalam JKMA (Jaringan Komunitas Masyarakat Adat).³¹ Narasumber menuturkan bahwa JKMA sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu (ketika penelitian ini dilakukan di awal tahun 2014).³² Namun, dia menyayangkan tidak adanya unsur perempuan di dalamnya. JKMA dibentuk pd 31 Januari 1999 di Ujong Batee, Aceh Besar.³³ Agar terdapat unsur perempuan dalam JKMA, narasumber bersama aktivis lainnya memaksa ikut dalam acara kongres JKMA yang dilaksanakan di Tapak Tuan, Aceh Selatan, yaitu di Hotel Putro Bungsu. Waktu itu Abdiya (Aceh Barat Daya) masih bergabung dengan Aceh Selatan.

... itu acara JKMA itu dibuat kongres kedua di Aceh Selatan. udah pernah kongres ke 1, tapi perempuan tidak terlibat. Jadi itu pak Budi di Banda Aceh waktu itu, kami sampai ngemis ngemis lo minta ikut karena di telepon di Banda Aceh katanya perempuan tidak diundang. Saya berdua dengan Nilawati namanya, “nggak boleh buk”, nggak diundang. Pak! kami masuk boleh nggak, nggak boleh nggak ada kursi. Kan kami sedih. Kami itu memang, menurut saya, nggak akan saya lupakan. Jadi pak nggak da kursipun boleh kami berdiri. Akhirnya betul-betullah kami berdiri. Benar berdiri asal dapat masuk karena Muspida ikut di situ.³⁴

Dari kutipan di atas dapat diketahui bagaimana peran aktivis perempuan Aceh Selatan memainkan perannya dalam memperjuangkan tegaknya hak-hak

³⁰Hasil wawancara dengan Rosna Anas, di Tapak Tuan, pada tanggal 31 Januari 2014.

³¹Website resmi JKMA adalah www.jkma-aceh.org.

³²Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

³³www.jkma-aceh.org

³⁴Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam JKMA. Kita bisa mengetahui bagaimana ternyata dalam organisasi yang menangani peradatan di Aceh, perempuan tidak dilibatkan, padahal perempuan merupakan bagian masyarakat yang sangat aktif dalam memelihara dan menjalankan adat di Aceh. Namun mereka tidak mendapat ruang dalam JKMA. Melalui perjuangan ini, akhirnya perempuan mendapatkan haknya untuk bisa terlibat aktif dalam JKMA.

Jadi Alhamdulillah di dalam pos (ruang kongres-pen) ini kan banyak laki-laki merokok, bosan mereka, duduklah kami. Begitu sesi tanya jawab, mulailah kami ini ngamuk berdua. Di situlah kami protes panitia. Protes kenapa perempuan tidak dilibatkan dalam acara besar seperti ini. Akhirnya mereka bilang, udah masuk ajalah buk, teken absen. Dari tidak ada kursi, dari tidak ada undangan, bisa ada komisi perempuan lahir. Di situ mulainya JKMA tadi terus lahirlah dewan adat perempuan.³⁵

Dari penjelasan di atas tergambar bagaimana perjuangan perempuan membuahkan hasil, yaitu lahirnya dewan adat perempuan dan komisi perempuan di JKMA. Jadi kehadiran perempuan dapat merubah kondisi yang tidak sensitive gender menjadi sensitif gender.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Narasumber dalam menjalankan program peningkatan sumber daya manusia ini melakukan beberapa bentuk kegiatan, yaitu mendirikan Majelis Taklim bagi ibu-ibu di Tapak Tuan,³⁶ penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) kabupaten Aceh Selatan bersama isteri Bupati Aceh Selatan, pendiri, pembina, dan pengajar TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an), pendiri sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), serta aktif membina berbagai organisasi kewanitaan yang berada di Aceh Selatan.

a. Majelis Taklim

Program peningkatan kapasitas perempuan tidak terlepas dari empati dan keprihatinan pemimpin perempuan terhadap realitas sosial masyarakat Aceh Selatan, khususnya kaum perempuan. Pendirian Majelis Taklim, misalnya,

³⁵Hasil wawancara dengan Hartini, di Tapak Tuan, 29 Januari 2014.

³⁶Tapak Tuan adalah nama ibu kota kabupaten Aceh Selatan

memiliki sejarah tersendiri yang mampu membangkitkan empati tokoh perempuan untuk meningkatkan kapasitas kaumnya. Narasumber, dengan kecerdasan emosional dan inteligensianya mampu menerawang dengan sangat baik kondisi perempuan di sekitarnya. Ceritanya, beberapa tahun yang lalu, ketika konflik masih berlangsung, sekitar tahun 1997, seorang nara sumber sebagai pemimpin perempuan mengajak jamaah shalat tarawih yang perempuan untuk melakukan tadarus sebagaimana dilakukan oleh laki-laki meski dengan waktu yang singkat. Pemimpin ini melihat hanya laki-laki saja yang mengaji setelah tarawih, mengapa perempuan tidak? Padahal perempuan juga bisa melakukannya dengan jaminan akan mendapat pahala bagi yang melakukannya. Dari sinilah awal mula inisiatif pendirian Majelis Taklim di Tapak Tuan.

Awalnya kesal karena wali santri acuh terhadap pengajian anak-anak. Begini! Dalam satu bulan Ramadhan, kami, bunda dan ayahnda, kan mengaji di Mesjid, tadarus sebentar sesudah tarawih. Waktu itu hanya sedikit yang mengaji, terutama ibu-ibu. Di situlah muncul niat bunda untuk mengajak mereka mengadakan pengajian. Mungkin kalau di mesjid mereka merasa malu, saya ajak dan tawarkan agar mengadakan pengajian di rumah ini. Awalnya mereka sangat semangat. Waktu itu bunda janji sama mereka, biar bunda yang mencari ustatnya, asalkan mereka mau datang. Jadi bunda undanglah satu ustat untuk mengajar mengaji. Tapi apa kejadiannya, malamnya sedikit sekali yang datang. Padahal yang berjanji mau ikut itu ramai. Jadi karena bunda malu sama ustat tersebut, bunda jemputlah ke rumah mereka satu persatu. Ada macam-macam alasan mereka. Ada yang katanya anak-anaknya tidak kasi karena tidak ada yang jaga, padahal anaknya sudah besar. Bunda tanyaklah sama anaknya: Nak apa boleh mamak belajar mengaji di rumah bunda sebentar. Kata anaknya: boleh bunda. Jadi itulah mau mamaknya ikut ke rumah bunda. Jadilah yang ikut mengaji malam itu delapan orang. Di situlah bunda tahu bahwa mereka tidak pandai mengaji, makanya mereka malu untuk datang. Kemudian karena senang mereka minta seminggu jangan hanya sekali. Jadi banyak yang berkesan karena mereka belajar dari nol.³⁷

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa keterlibatan ibu-ibu mengikuti berbagai kegiatan keagamaan relatif terbatas. Pemimpin perempuan ini mencoba membuka ruang untuk itu. Pengajian dan penambahan pengetahuan agama bukanlah hanya milik kaum laki-laki saja, perempuan juga

³⁷Hasil wawancara dengan Dasmara Sukma, di Tapak Tuan pada tanggal 31 Januari 2014.

berhak mendapatkannya. Pada sisi lain, dapat disebutkan aktivitas di ruang publik, dalam hal ini masjid, kurang mendapat sambutan ternyata disebabkan oleh lemahnya sumber daya yang mereka miliki. Selanjutnya menyangkut dengan kenyamanan ibu-ibu mengikuti pengajian adalah di tempat privat. Cara mengajak ibu-ibu yang relatif lemah SDMnya tidak dapat dilakukan secara terbuka, namun harus dengan persuasif, dari hati-ke hati. Dengan cara seperti ini, Majelis Taklim ini mulai berkembang. “Pada hari-hari selanjutnya, bertambahlah anggota pengajian. Jadi karena yang belajar mulai dari nol, sampai ada yang bisa membaca metode iqra’, dan sampai bisa membaca al-Qur’an dan kemudian kami juga belajar tafsir.”³⁸

Dewasa ini jumlah anggota Majelis Taklim ini mencapai 130 orang. Mereka berasal dari berbagai kecamatan di Aceh Selatan. Materi utama pengajian di Majelis Taklim ini adalah pendalaman pemahaman agama, dengan menghadirkan ustaz atau teungku dari berbagai latar belakang pendidikan dan dari berbagai latar belakang organisasi keagamaan. Tujuannya adalah menciptakan solidaritas keberagaman dan terhindar dari panatisme terhadap ajaran tertentu. Dari aspek peningkatan solidaritas keberagaman, kondisi ini sangat menarik, karena Aceh Selatan mengamalkan dua tradisi keberagaman yang relatif kentara, yaitu Muhammadiyah dan Ulama Dayah Salafi yang mengamalkan mazhab Syafi’i secara relatif ketat. Penerapan ini sangat penting untuk menciptakan harmonisasi kehidupan sosial beragama di Aceh selatan. Untuk mengembangkan majlis taklim, di Aceh Selatan telah dibentuk BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) sejak tahun 1997 dan ibu Narasumber ditunjuk sebagai ketuanya sampai sekarang (2014).³⁹

b. Arisan bagi Ibu-ibu

Menyiasati agar ibu-ibu tetap memiliki wadah untuk bersatu dan pengembangan kapasitas mereka, pemimpin non formal ini membuat wadah lain bagi yang tidak bersedia bergabung ke Majelis Taklim, yaitu arisan bulanan.

³⁸Hasil wawancara dengan Dasmara Sukma, di Tapak Tuan pada tanggal 31 Januari 2014.

³⁹Hasil wawancara dengan Dasmara Sukma, di Tapak Tuan pada tanggal 31 Januari 2014.

Sejauh ini, anggotanya berjumlah 21 orang.⁴⁰ Terdapat ketentuan yang bernilai konstruktif dalam arisan ini, yaitu:

- 1) Peningkatan pengetahuan agama. Setiap arisan diadakan ceramah dan tanya jawab masalah keagamaan.
- 2) Penanaman prinsip kesederhanaan. Pembatasan dalam penyediaan makanan. Mereka sepakat bahwa tuan rumah hanya boleh menyediakan minuman ringan dan dua macam kue. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perlombaan dalam menyediakan makanan dan berakibat pada keengganan orang lain untuk terlibat dalam arisan. Selain itu adalah untuk menanamkan nilai kesederhanaan pada anggota mereka.
- 3) Kegiatan amal. Bagi yang mendapatkan arisan harus menyedekahkan sebagian kecil untuk keperluan fakir dan miskin.

c. PKK

Selain membina perempuan melalui Majelis Taklim, Narasumber bersama dengan Tokoh perempuan lainnya (Rosna Anas) terlibat aktif sebagai penggerak PKK di Aceh Selatan sejak masa konflik sampai sekarang. Keterlibatan dua narasumber dalam penggerak PKK adalah karena narasumber sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Rosna Anas sebagai isteri dari PNS dan kemudian menjadi anggota legislatif Kabupaten Aceh Selatan selama tiga periode. Bahkan, pada periode ke dua dan ke tiga menjadi satu-satunya perwakilan perempuan. Pada tahun 2010 di Jakarta, Rosna Anas mendapat anugerah Pin Mas dari Pemerintah Pusat. Pin Mas ini diberikan kepada perempuan yang aktif membina PKK selama 25 tahun atau lebih tanpa henti.⁴¹

d. Pendidikan

Selain kegiatan di atas, ke dua narasumber juga bergerak dalam dunia pendidikan. Masing-masing mereka mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) bagi anak-anak. Dasmara Sukma, misalnya, ikut mendirikan TPA dan

⁴⁰Hasil wawancara dengan Dasmara Sukma, di Tapak Tuan pada tanggal 31 Januari 2014.

⁴¹Hasil wawancara dengan Dasmara Sukma, di Tapak Tuan pada tanggal 31 Januari 2014; Hasil wawancara dengan Rosna Anas, di Tapak Tuan, pada tanggal 31 Januari 2014.

PAUD. Sedangkan Rosna Anas mendirikan TPA sendiri dan merangkap sebagai direktornya, dengan anggota berjumlah delapan orang.

4. Pemberdayaan ekonomi

Sebagaimana disebutkan di atas, selain aktif dalam aktivitas peningkatan kapasitas kaum perempuan, narasumber juga aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah, khususnya kaum perempuan. Terdapat dua bentuk kegiatan yang dilakukan, yaitu arisan (sebagaimana telah dijelaskan di atas) dan koperasi simpan pinjam untuk modal usaha.

Pembentukan koperasi simpan pinjam ini memiliki cerita tersendiri. Pada awalnya, banyak ibu-ibu yang membuka usaha kecil-kecilan. Narasumber bertanya kepada mereka: apakah tidak sebaiknya usaha yang mereka lakukan itu diperbesar. Kebanyakan ibu-ibu tersebut mengeluhkan tentang minimnya modal yang mereka miliki. Berangkat dari keadaan ini, narasumber menginisiasi agar mereka bersedia membentuk koperasi untuk mereka sendiri. Ide ini kemudian disahuti dan terbentuklah koperasi simpan pinjam tersebut.

Kami juga membentuk koperasi. Awalnya Cuma terkumpul beberapa juta saja, sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan anggota boleh pinjam hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu ada bantuan dari Bank Syariah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dapat dipinjamkan kepada anggota Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Ada juga dari bank konvensional 2003. Tahun 2007 itu bantuan dari Bank Syariah. Asalnya 18 orang, kemudian bertambah menjadi 70 orang. Setelah ada tambahan modal dari bank konvensional, waktu itu bisa pinjam Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), itu tanpa margin... awalnya pendirian koperasi ini, waktu itu bunda melihat banyak pengusaha kecil yang mengeluh karena kekurangan modal. Mereka bilang: modal dari mana, kalau ambil bank bagaimana? Inilah awal mulanya. Jadi bunda tawarkan bagaimana kalau dibentuk koperasi dan ternyata mereka mau. Asalnya simpanan sukarela. Waktu itu hanya terkumpul Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sekarang 192 orang anggotanya. Ada yang bisa pinjam 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), walaupun itu hanya untuk orang-orang tertentu saja, karena secara umum hanya bisa pinjam Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pinjaman ini tanpa agunan, ya, hanya kepercayaan. Mulai buka koperasi tahun 2003. Anggotanya adalah majlis taklim dan masyarakat luas, dengan catatan diketahui orangnya dengan jelas. Yang menjadi sekretaris sekarang adalah Nasdiar SPd. Mengenai

kantor koperasi, kami gunakan ruang praktik dokter almarhum suami saya untuk ruangnya, tanpa sewa yang ditetapkan...⁴²

Menarik di sini adalah keadaan pengusaha perempuan yang sedemikian rupa terlihat oleh pemimpin perempuan ini. Pembangunan ekonomi kerakyatan bagi perempuan mampu dilakukan dengan sangat baik oleh perempuan. Dari kutipan di atas dapat dilihat bagaimana sosok pemimpin perempuan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat kecil, terutama kelompok perempuan. Kondisi ini seyogyanya membuka mata kita betapa perempuan juga memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun dan membina masyarakat. Demikianlah peran dan kiprah perempuan di Aceh Selatan dalam pembangunan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk-bentuk peran di ruang publik yang dijalankan oleh tokoh-tokoh perempuan di Aceh Selatan sejak masa konflik sampai masa damai meliputi berbagai bidang, yaitu bidang pembinaan dan pengembangan organisasi sosial, politik, ekonomi, peningkatan SDM, dan keagamaan.
2. Latar belakang mereka terlibat di ruang publik disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor melihat situasi sosial politik yang ada secara kritis dan keinginan untuk memperbaikinya, pengalaman berorganisasi pada masa menempuh pendidikan, dan kekecewaan yang mendalam melihat bias gender yang terjadi di masyarakat yang lebih mengedepankan laki-laki untuk memiliki pendidikan yang tinggi dibandingkan perempuan. Padahal, perempuan juga memiliki kemampuan akademik yang sama dengan laki-laki, atau bahkan tidak sedikit yang lebih baik dari laki-laki.

⁴²Hasil wawancara dengan Dasmara Sukma, di Tapak Tuan pada tanggal 31 Januari 2014.

Referensi

- Abdullah, Adnan. dkk. (1986) *Kedudukan dan Peranan Wanita Pedesaan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Elvira Iskandar, "Ketersediaan Lahan Pertanian Padi Sawah Pasca Tsunami Di Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Agrisepe*, Vol (14) No. 1, 2013.
- Hermaliza, Essi. (2011). Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan. *Widyariset*, 14(1), 124.
- Kurnia Jayati, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Tahun 1976-2005", *Jurnal Al-Turas*, Vol XIX No. 1, Januari 2013.
- Marwan Idris, "Kesukarelawanan dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Aceh," *Lporan Penelitian*, Aceh, Indonesia, 2011.
- Muhammad Iqbal, "Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki", *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun VII, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Ni Nyoman Sukerti, "Gender Dalam Hukum Adat," *Makalah Ilmiah*.
- Khoiruddin Nasution, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVII, tahun 2007.
- Rida Safuan Selian, *Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan "Ngerje" Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah*. Tesis. Semarang: Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2007.
- Zainuddin, M. (2017). PERAN ULAMA PEREMPUAN DI ACEH (Studi Terhadap Kiprah Perempuan Sebagai Ulama di Kabupaten Bireuen dan Aceh Besar). *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, 1(1), 57-69.